

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Nur Azizah NIM: 3421055** yang berjudul “**Analisis Praktek Pengelolaan Keuangan Nagari Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sinjunjung**”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menuntut agar pengelolaan keuangan nagari dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan masih banyaknya kendala, seperti ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana nagari. Di Nagari Silongo ditemukan praktik pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga menimbulkan berbagai persoalan, termasuk dalam aspek pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan keuangan Nagari Silongo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu melalui wawancara antara peneliti dan informan, dan data sekunder yaitu terdiri dari observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya transparansi kepada masyarakat, keterlambatan pelaporan, serta ketidaksesuaian anggaran dan realisasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan media publikasi pelaporan keuangan agar pengelolaan keuangan nagari lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, perlu adanya pengawasan berkelanjutan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten agar pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap sesuai regulasi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah nagari dalam memperbaiki tata kelola keuangan secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif*

ABSTRACT

This thesis was written by **Nur Azizah, Student ID: 3421055**, entitled "**An Analysis of Nagari Financial Management Based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Nagari Silongo, Lubuk Tarok Subdistrict, Sijunjung Regency.**" This study was conducted under the Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

This research was motivated by the provisions in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, which requires that financial management at the nagari level be conducted transparently, accountably, participatively, and with budgetary order and discipline. However, field implementation shows several challenges, such as mismatches between budgeting and realization, and limited community involvement in the management process. In Nagari Silongo, financial management practices were found to be inconsistent with these principles, particularly in the aspects of budget implementation and reporting. This research aims to analyze the financial management practices of Nagari Silongo based on the said regulation.

This study uses a qualitative descriptive approach. The data consist of primary data obtained through interviews between the researcher and informants, and secondary data gathered through observation and documentation. Data collection techniques include interviews, observation, and document studies. The data were analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

The results show that the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability have mostly been carried out in accordance with the regulations. However, there are still obstacles such as lack of transparency to the public, delays in reporting, and inconsistencies between budget plans and their realization. Therefore, there is a need to improve the capacity of government apparatus and enhance public access to financial reports to ensure more accountable and transparent financial management. Continuous supervision from the sub-district and district governments is also necessary to ensure compliance with regulations. The findings of this research are expected to provide input for the nagari government in improving financial governance more comprehensively.

Keywords: *Village Financial Management, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, Transparency, Accountability, Participatory*